

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK  
NEGARA UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan efektifitas dalam Pengelolaan dan Penatausahaan Milik Negara dipandang perlu menunjuk Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
  6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan, identifikasi dan inventarisasi Barang Milik Negara yang ada di organisasi LKPP;
2. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara di Unit Kerja Eselon II;
3. Melaporkan pembelian belanja modal sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara;
4. Melaporkan kondisi barang dan pemindahtanganan penggunaan Barang Milik Negara di Unit Kerja Eselon II; dan
5. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan penatausahaan Barang Milik Negara.

- KETIGA : Masa kerja Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.
- KEEMPAT : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang besarnya sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 21 Maret 2018  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
2. PPK Biro Umum dan Keuangan;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG KOORDINATOR  
PENGELOLAAN DAN  
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK  
NEGARA UNIT KERJA ESELON II  
TAHUN ANGGARAN 2018 DI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TANGGAL : 21 Maret 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK  
NEGARA UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

| No | Kedudukan dalam Tim | Nama                      | Unit Kerja Eselon II  | Honorarium (Rp) |
|----|---------------------|---------------------------|---|-----------------|
| 1  | Penanggung Jawab    | Dwi Wahyuni Kartianingsih | Biro Umum dan Keuangan  | 450.000         |
| 2  | Ketua               | Moch Zaini                | Biro Umum dan Keuangan  | 400.000         |
| 3  | Sekretaris          | Muhammad Irsyan Halomoan  | Biro Umum dan Keuangan  | 300.000         |
| 4  | Anggota             | 1. Satriyo Wibowo         | Biro Umum dan Keuangan  | 300.000         |
|    |                     | 2. Intan Dana Lestari     | Biro Umum dan Keuangan  | 300.000         |
|    |                     | 3. Angga Fariz Prayoga    | Biro Umum dan Keuangan  | 300.000         |
|    |                     | 4. Nur Hartoyo            | Biro Umum dan Keuangan  | 300.000         |
|    |                     | 5. Rati Karimah           | Biro Umum dan Keuangan  | 300.000         |
|    |                     | 6. Kurnia Sari            | Biro Umum dan Keuangan  | 300.000         |
|    |                     | 7. Adi Irawan             | Biro Umum dan Keuangan  | 300.000         |
|    |                     | 8. Mukti Herlambang       | Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata laksana                 | 300.000         |
|    |                     | 9. Rasmita Juliana Sitepu | Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian                  | 300.000         |
|    |                     | 10. Andi Darmawan         | Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum | 300.000         |

|  |                          |   |         |
|--|--------------------------|---|---------|
|  | 11. Lailatul Mufarokah   | Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus | 300.000 |
|  | 12. M Hanif Firnanda     | Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional | 300.000 |
|  | 13. Adi Afrianto         | Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan        | 300.000 |
|  | 14. Lulu Haryani         | Direktorat Pengembangan Sistem Katalog                          | 300.000 |
|  | 15. Doddy PAscal         | Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik      | 300.000 |
|  | 16. Verawaty Simorangkir | Direktorat Pengembangan Profesi                                 | 300.000 |
|  | 17. Rizky Arimawati      | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa            | 300.000 |
|  | 18. Dwi Hendri Cahyadi   | Direktorat Sertifikasi Profesi                                  | 300.000 |
|  | 19. Edi Kristiyanto      | Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I          | 300.000 |
|  | 20. Astri Erviana        | Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II         | 300.000 |
|  | 21. Taufikurrohman       | Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum                        | 300.000 |
|  | 22. Sazzali              | Inspektorat   | 300.000 |

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA